

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA PROVINSI JAWA TIMUR

Lailatul Fitriyah dan Lucky Rachmawati

Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya

ABSTRACT

The problem of imbalance income is one of important problem in region economic development at sector GERBANGKERTASUSILA, East Java Province. The purpose of this research was to know the overview of GRDP of regency/city, analyzing imbalance level of income and it correlation with residents prosperity and find where sector giving more contribution for GRDP at year 2007-2011. Data used in this research was secondary data and method of collecting data used was documentation method. Analysis tool used to know the overview of GRDP and sector contribution was descriptive analysis. While to know the imbalance level of income used Williamson Index.

Result of this research shows that GRDP of regency/city sustaining improvement annually. The imbalance income at sector GERBANGKERTASUSILA classified as high (close to 1) and tends to increased annually. Regency/city which has lower imbalance income with better prosperity level was Gresik Regency, Mojokerto Regency, Mojokerto City, and Sidoarjo Regency. Whereas regency/city has moderate imbalance income with middle-low prosperity was Bangkalan Regency. Regency/city sectors contribution dominated by commerce sector and processing industry sector.

Keywords: GRDP, imbalance income, sector contribution

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan

oleh daerah yang efisien dan efektif menuju kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Tambunan,2003:40). Namun pada kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditunjukkan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan

taraf hidup masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Jadi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu daerah/wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan banyaknya jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti dengan pemerataan. Kuncoro (2004:127) menyatakan pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki dan adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas, seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga yang terampil. Sementara itu, perbedaan potensi dan fasilitas serta kemudahan pada tiap daerah, akan membuat

industri ataupun aktivitas ekonomi menjadi mengelompok dan membentuk suatu aglomerasi.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki luas wilayah 46.428,57 km², terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, 640 kecamatan dan 8.464 desa yang mempunyai keragaman antar daerah. Keragaman antar daerah ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Dimana sebaran sumberdaya ini tidak merata serta pertumbuhan pusat pertumbuhan perdagangan dan industri hanya terkonsentrasi pada beberapa tempat saja. Hal tersebut membuat pembangunan ekonomi daerah yang memiliki keunggulan pada salah satu bidang menjadi lebih tinggi dari daerah lainnya, sehingga tingkat ketimpangan antar daerah menjadi tinggi.

Kawasan GERBANGKERTOSUSILA merupakan salah satu satuan wilayah pembangunan (SWP) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Glaeser dan Khan (2003) kawasan ini memiliki sektor unggulan industri serta memiliki kedekatan lokasi. GERBANGKERTOSUSILA terdiri dari: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, yang menjadikan Surabaya (daerah nodal) menjadi pusat kegiatan ekonominya.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan GERBANGKERTOSUSILA sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota.

Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. (Landiyanto, 2005).

PDRB kawasan GERBANGKERTOSUSILA dari tahun 2007 dan 2011 selalu mengalami kenaikan. Kota Surabaya, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian tetap menjadi pendukung utama dalam pembentukan PDRB Jawa Timur, baik pada tahun 2007 maupun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Kota Surabaya memberikan kontribusi tertinggi sebesar 27,30 %, diikuti dengan Kabupaten Sidoarjo 7,65%, Kabupaten Gresik 4,98%, Kabupaten Mojokerto 2,47%, Kabupaten Lamongan 1,56%, Kabupaten Bangkalan 0,98% dan terendah pada Kota Mojokerto 0,37%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan GERBANGKERTOSUSILA yang lain yang jauh dibawahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi seluruh masyarakat daerah tersebut.

PDRB perkapita kabupaten/kota di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA, Propinsi Jawa Timur mempunyai perbedaan yang signifikan dan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Kota Surabaya memiliki PDRB perkapita tertinggi

dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai PDRB perkapita terendah. Kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB perkapita diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Mojokerto. Sedangkan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan berada di bawah rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengidentifikasi adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur.

Apabila pertumbuhan hanya terpusat pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja maka *trickle down effect* (dampak penetes kebawah) yang diharapkan akan sulit tercapai. Ketidakmerataan pertumbuhan ini menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan di Jawa Timur khususnya pada kawasan GERBANGKERTOSUSILA.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang “ Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur”.

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui gambaran umum PDRB kabupaten/kota. (2) untuk menganalisa tingkat ketimpangan serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. (3) untuk mengetahui sektor mana yang berkontribusi besar terhadap PDRB di

Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam buku Todaro (2006:11-12), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan. Selain itu juga pembangunan ekonomi mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan, demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien.

Sukirno (2006:3) juga mengartikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Hal ini berarti pembangunan ekonomi sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang.

Menurut Arsyad (2010:374) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelolah setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

Myrdal dalam Jhingan (2010:211-212), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Myrdal mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi disuatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu.

Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal

adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang.

Teori Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Prancis, pada tahun 1955. Francois berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya tidaklah lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan lokasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut (Sjafrizal, 2008:127).

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya).

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia

Teori ekonomi tentang teori modal manusia dipelopori oleh para pemenang nobel ilmu ekonomi, yaitu Gary Becker, Edwar Denison dan Theodore Schultz. Teori ini menjelaskan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih besar dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi (Jhingan, 2010: 415).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *human development index* (HTI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni: (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standar kehidupan.

Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga komponen yaitu lamanya hidup dukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antar angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

$$X_2 = 1/3 X_{12} + 2/3 X_{22}$$

Keterangan:

- X_1 = Lamanya hidup (tahun)
- X_2 = Tingkat Pendidikan; 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama bersekolah)
- X_3 = pengeluaran riil per kapota (Rp 000.)
- X_{12} = Rata – rata lama bersekolah (tahun)
- X_{22} = Angka melek huruf (persen)

Perhitungan indeks dari masing-masing indikator tersebut adalah:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{X_{(i,j)} + X_{(i-\min)}}{X_{(i-\max)} + X_{(i-\min)}}$$

Dimana:

- $X_{(i,j)}$ = Indikator ke-i dari daerah j
- $X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum dari X_i
- $X_{(i-\max)}$ = Nilai Maksimum dari X_i

UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam empat kategori, sebagai berikut:

Rendah bila angka IPM < 50

Menengah bawah bila angka 50 < IPM < 66

Menengah atas bila angka 66 < IPM < 89

Tinggi bila angka IPM > = 90

(Sumber: BPS Jatim, 2010).

Teori Ketimpangan

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Model neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik Sjafrizal (2008:104-105).

Dalam hipotesis neoklasik ketimpangan pembangunan pada permulaan

proses cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dengan kata lain ketimpangan pada negara berkembang relatif lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut relatif lebih rendah.

Ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan. (Sjafrizal, 2008:107).

Ketimpangan Pembangunan Daerah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah

dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah (Sjafrizal, 2008:104).

Indeks Williamson

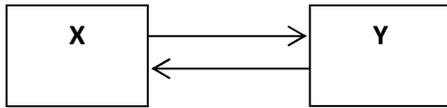
Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar.

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dimana semakin mendekati nol artinya ketimpangan kecil atau semakin merata. Sedangkan apabila mendekati angka satu maka ketimpangan daerah yang diteliti semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Rancangan penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Rancangan Penelitian

Keterangan:

X = ketimpangan daerah yang diukur dengan Indeks Willamson

Y = Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari nilai IPM dan Tingkat pengangguran.

\rightleftarrows = Keterkaitan antara ketimpangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan gambaran umum PDRB masing-masing Kabupaten/Kota, gambaran ketimpangan, masing-masing Kabupaten/Kota dan kesejahteraan masyarakat di kawasan GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

2. Analisis Perencanaan Pembangunan

Penelitian ini menggunakan perhitungan Indeks Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 (f_i/n)}}{\bar{Y}} \quad 0 < IW < 1$$

Dimana:

IW = Nilai Indeks Ketimpangan Williamson

Y_i = PDRB perkapita di kabupaten/kota – i

\bar{Y} = rata-rata PDRB perkapita di Kawasan Gerbangkertosusila

f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota

– i

n = Jumlah penduduk di Kawasan Gerbangkertosusila.

HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan pada kawasan ini diukur dengan menggunakan pengukuran PDRB per kapita Atas Harga Konstan 2000 dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat ketimpangan di GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur mengalami kecenderungan peningkatan di tahun 2007 hingga 2011 terlihat dari hasil analisis dari 0.917453818 menjadi 0.950299072. Terjadi peningkatan sebesar 0.013 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu sebesar 0.004, dan terus mengalami peningkatan sebesar 0,01 pada tahun 2010 menjadi 0.945246655 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,005 menjadi 0.950299072.

Tabel 1. Indeks Williamson

Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
2007	0.917453818	-
2008	0.930272331	0.013
2009	0.934434376	0.004
2010	0.945246655	0.010
2011	0.950299072	0.005

Sumber: BPS, Jatim 2012 (diolah)

PEMBAHASAN

1. Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kawasan Gerbangkertosusila

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kenaikan atau penurunan PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Kabupaten/kota yang memiliki PDRB terkecil adalah PDRB Kota Mojokerto dengan nilai PDRB sebesar 1,385 triliun pada tahun 2011 dengan kontribusi hanya 0,78% terhadap total PDRB kawasan GERBANGKERTOSUSILA, Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangkalan dengan nilai PDRB 3,6 triliun tahun 2011 dengan kontribusi 2,15%. Sedangkan nilai PDRB terbesar terdapat pada Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan dengan nilai PDRB 99,35 triliun pada tahun 2011 serta berkontribusi sekitar 59% dari total PDRB GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur.

Nilai PDRB tiap kabupaten/kota tidaklah sama, seperti pendapat dari Francois (1955) bahwa pertumbuhan ekonomi antar daerah tidaklah lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang

memiliki keuntungan lokasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi (Sjafrizal, 2008: 127).

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik, yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan masyarakat senang dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut.

Sesuai dengan pendapat tersebut Kota Surabaya dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Timur khususnya kawasan GERBANGKERTOSUSILA karena memiliki nilai PDRB yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA.

Analisis Ketimpangan Pendapatan

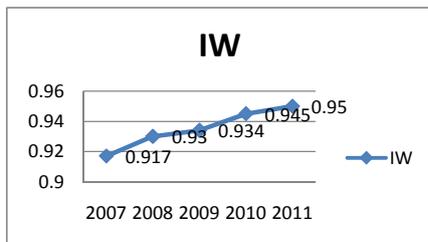
Pembangunan di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa Timur telah menimbulkan ketimpangan dalam prosesnya yang diamati dalam 5 tahun terakhir 2007 hingga 2011, telah memberikan gambaran yang fluktuatif dengan kecenderungan yang terus meningkat.

Tingkat ketimpangan yang terjadi karena adanya sejumlah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi, yang antara lain disebabkan oleh keberadaan

industri, pengelolaan SDA dan SDM di daerah tersebut. Hal ini yang dapat memicu terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di GERBANGKERTOSUSILA.

Gambar 1.

Grafik Perkembangan Indeks Williamson Gerbangkertosusila Tahun 2007-2011



Sumber: BPS, Jatim 2012 (diolah)

Kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB Perkapita yang tinggi diatas PDRB Perkapita di GERBANGKERTOSUSILA diantaranya: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Ketiga daerah inilah yang menjadi pemicu besarnya ketimpangan di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di daerah terbelakang.

Nilai ketimpangan setiap kabupaten/kota di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA Provinsi Jawa

Timur memiliki nilai yang bervariasi. Kabupaten/kota yang termasuk memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah adalah: Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang adalah: Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang diukur dengan nilai IPM, yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2

Perbandingan Tingkat Ketimpangan Dengan Nilai IPM

No.	Kabupaten/Kota	2011	
		IW	IPM
1.	Kab. Gresik	0.041429	75,21
2.	Kab. Bangkalan	0.224432	65,36
3.	Kab. Mojokerto	0.122397	74,18
4.	Kota Mojokerto	0.018739	77,47
5.	Kota Surabaya	0.885825	77,87
6.	Kab. Sidoarjo	0.057008	77,03
7.	Kab. Lamongan	0.218436	70,13

Sumber: BPS, Jatim 2012 (diolah)

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu daerah/wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Oleh karena itu, berdasarkan Tabel 2 disajikan matriks klasifikasi kabupaten/kota

menurut perbandingan antara tingkat ketimpangan dengan nilai IPM.

Tabel 3
Matriks Klasifikasi Kabupaten/kota

IW IPM	IW < 0,2	IW > 0,2
IPM > 66	Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kab Sidoarjo	Kota Surabaya dan Kab. Lamongan
IPM < 66	-	Kab. Bangkalan

Sumber: Tabel 2, (diolah)

Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan berhasil dalam proses pembangunan apabila tingkat ketimpangan daerah tersebut kecil atau semakin merata dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan sebaliknya. Berdasarkan matriks dalam tabel 3 tersebut terdapat empat kabupaten/kota yang dapat dikatakan berhasil dalam proses pembangunan yaitu: Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kabupaten yang kurang berhasil dalam proses pembangunan hanyalah Kabupaten Bangkalan. Namun, Kabupaten/kota yang perlu waspada terhadap tingkat ketimpangan yang semakin melebar walapun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan.

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB

Ketimpangan yang terjadi di GERBANGKERTOSUSILA ini tidak terlepas dari kontribusi tiap sektor terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota. Apabila sektor yang bersifat padat modal menyumbang tertinggi maka hanya mempertinggi PDRB perkapita wilayah tersebut tetapi penyerapan terhadap tenaga kerja relatif kecil. Sebaliknya, apabila sektor yang bersifat padat karya menyumbang tertinggi maka dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Sumbangan/kontribusi masing-masing sektor kabupaten/kota di GERBANGKERTOSUSILA tidaklah sama. Kondisi di Kota Surabaya dan Kota Mojokerto terjadi hal yang sama yaitu masih didominanya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Di Kota Surabaya sektor tersebut menyumbang sekitar 39,59% pada tahun 2007 dan naik hingga 41,58% pada tahun 2011.

Kondisi yang berbeda terjadi pada 4 kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto. Keempat kabupaten tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu rata-rata sekitar 50% pada tahun 2007 dan turun sekitar 46% pada tahun 2011. Sedangkan, Kabupaten Lamongan didominasi oleh sektor pertanian yaitu sekitar 50,92% pada tahun 2007 dan turun pada tahun 2011 menjadi 44,98%. Sektor pertanian ini mengalami penurunan yang terjadi setiap

Kabupaten/Kota ditinjau dari tahun 2007 dan 2011.

Pembagian angkatan kerja yang bekerja dan perkembangannya dibedakan tiga sektor, yaitu: sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air; bangunan) dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa).

1. Kota Surabaya

Perekonomian Kota Surabaya ditopang oleh sektor tersier (70,79%) dan sektor sekunder (12,29%). Sektor tersier dapat menyerap tenaga kerja sebesar 53,47% sedangkan sektor sekunder menyerap tenaga kerja sebesar 27,55%.

Hal ini menunjukkan sektor tersier dan sektor sekunder mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kota Surabaya karena dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan sektor primer.

2. Kabupaten Sidoarjo

Perekonomian Kabupaten Sidoarjo ditopang oleh sektor sekunder (56,69%) dan sektor tersier (46,41%). Sektor sekunder dapat menyerap tenaga kerja sebesar 39,75% sedangkan sektor sekunder menyerap tenaga kerja sebesar 34,54%. Walaupun sektor primer mengontribusi lebih kecil tetapi sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang banyak sebesar 25,71%. Hal ini berarti sektor sekunder dan sektor tersier mempunyai peranan yang

penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo karena dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan sektor primer.

3. Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik menempati posisi ketiga setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, meskipun demikian tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Sidoarjo. Sektor yang memberikan kontribusi yang besar adalah pertambangan, industri pengolahan dan infrastruktur. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Gresik ditopang oleh sektor sekunder (54,39%) dan sektor tersier (35,20%). Namun, yang menarik adalah walaupun sektor sekunder dan sektor tersier memberikan kontribusi besar terhadap PDRB tetapi kurang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan, sektor primer yang hanya mengontribusi sebesar 10,43% namun dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak yaitu sebesar 36,43%.

Hal ini menunjukkan industri yang berkembang kebanyakan bersifat *modal intensif* (menyerap banyak modal) sehingga kurang menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Gresik lebih memperhatikan sektor primer khususnya sektor pertanian karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

4. Kota Mojokerto

Sumbangan PDRB Kota Mojokerto paling rendah di GERBANGKERTOSUSILA, meskipun demikian pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM cukup baik. Sektor yang mendukung perekonomian

daerah adalah perdagangan dan jasa. Hal ini berarti perekonomian daerah ditopang oleh sektor tersier yang mencapai 80,47% dengan menyerap tenaga kerja terbanyak sebesar 43,07%.

Hal ini berarti sektor tersier mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kota Mojokerto karena selain memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

5. Kabupaten Mojokerto

Sektor yang memberikan kontribusi yang besar adalah industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Mojokerto ditopang oleh sektor sekunder (41,54%) dan sektor tersier (38,58%). Namun, yang menarik adalah walaupun sektor sekunder dan sektor tersier memberikan kontribusi besar terhadap PDRB tetapi kurang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan, sektor primer yang hanya mengontribusi sebesar 19,92% namun dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak yaitu sebesar 37,07%.

Hal ini menunjukkan industri yang berkembang kebanyakan bersifat *modal intensif* (menyerap banyak modal) sehingga kurang menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Mojokerto lebih memperhatikan sektor primer khususnya sektor pertanian karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

6. Kabupaten Lamongan

Sektor yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Lamongan ditopang oleh sektor primer (45,19%) dan sektor tersier (45,48%). Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan yang pada tahun 2007 berkontribusi sebesar 50,92% menjadi 44,95%. Namun sektor perdagangan mengalami kenaikan yang pada tahun 2007 sebesar 25,65% naik menjadi 30,01% pada tahun 2011.

Pergeseran sektor ini ternyata berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dimana sektor tersier lebih unggul dibandingkan sektor primer yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini juga berdampak pada tingkat pengangguran yang naik dari 3,62% pada tahun 2010 naik menjadi 4,40% pada tahun 2011.

7. Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan menempati posisi terendah. Sektor yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa-jasa. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Bangkalan ditopang oleh sektor tersier (56,01%) dan sektor primer (31,30%). Walaupun sektor tersier memberikan kontribusi yang besar tetapi tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang besar. Sedangkan, sektor primer mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak yaitu sebesar 66,69%

Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah Kabupaten Bangkalan lebih memperhatikan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak terutama sektor pertanian. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran umum PDRB di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA menunjukkan bahwa mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Kabupaten/kota yang memiliki PDRB tertinggi adalah Kota Surabaya. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki PDRB terendah adalah Kota Mojokerto.

Terjadi ketimpangan pembangunan yang tinggi (mendekati 1) di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA dan cenderung naik setiap tahunnya. Kabupaten/kota yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah dengan tingkat kesejahteraan yang semakin membaik adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki ketimpangan pendapatan sedang dengan tingkat kesejahteraan menengah kebawah adalah Kabupaten Bangkalan. Ketimpangan dan tingkat kesejahteraan tertinggi berada di Kota Surabaya.

Kontribusi masing-masing sektor kabupaten/kota di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA tidaklah sama. Kota Surabaya dan Kota Mojokerto didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto didominasi oleh sektor industri dan pengolahan. Sedangkan Kabupaten Lamongan didominasi oleh sektor pertanian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta analisis terhadap hasil dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan antara lain: (1) Pembangunan tidak hanya ditekankan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tetapi sebaiknya memperhatikan pembangunan manusia didalamnya, sehingga kualitas hidup masyarakat lebih terjamin dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (2) Perlunya kolaborasi dan sinergi antar kabupaten/kota kawasan dengan mengembangkan sektor-sektor produktif sesuai karakteristik daerah sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif daerahnya. Sehingga dapat terbentuk sistem jaringan yang saling menguntungkan dan mengoptimalkan aglomerasi ekonomi. (3) Pemerintah daerah seharusnya lebih mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan manusia. Diantaranya dengan memperbaiki sarana dan parasana infrastruktur pendidikan dan kesehatan, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang mampu di tingkat jenjang pendidikan, memperbaiki kualitas SDM dengan menambah tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. (4) Penelitian ini

masih banyak keterbatasan karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan dengan menambahkan beberapa variabel lainnya yang berkaitan dengan ketimpangan daerah, seperti: PAD, Investasi, belanja pemerintah, keterkaitan antar sektor dll. Dan menambahkan alat analisis ketimpangan lainnya, diantaranya: indeks entropy theil, Gini ratio, kurva loren dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amrillah, & Yasa, Mahendra. 2013. Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* (online), (ojs.unud.ac.id > ... > Vol. 2, No. 4, April 2013 (pp. 173-207) > Amrillah) diakses pada tanggal 10 April 2013.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS. 2012. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2012*. Jawa Timur: BPS Jatim.
- . 2012. *Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur 2007-2011*. Jawa Timur: BPS Jatim.
- . 2012. *PDRB Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2007.2011*. Jawa Timur: BPS Jatim.
- Caska, & Riadi, RM. 2006. Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau. *Ekonomi Pembangunan* (online), (<http://rmriadi.yolasite.com/resources/Jurnal%20Pertumbuhan%20dan%20Ketimpangan.pdf>) diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
- Ginandjar. 2012. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (www.ginandjar.com). Diakses pada tanggal 14 Februari 2013.
- Irawan, M & Suparmoko. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke enam. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: UPP AAMP YKPN.
- . 2004. *Otonomidan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- . 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Landiyanto, Agustino. 2005. *Spesialisasi Dan Kosentrasi Spasial Pada Sektor Industri Manufaktur Di Jawa Timur*. Dipresentasikan pada seminar di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Masli, Lili. 2007. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (online), (<http://stan-im.ac.id>) diakses pada tanggal 20 Januari 2013.
- Sari, Kurnia, & Budhi, Sri. 2013. Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (online), (ojs.unud.ac.id) diakses pada tanggal 12 Januari 2013.
- Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* (online), (www.unisbank.ac.id) > Home > Vol 16,

- No 01 (2009) › Sasana) diakses pada tanggal 25 Desember 2012.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sultan, & Sodik, J. 2010. Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di DIY – Jawa Tengah Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Periode 2000-2004. *BuletinEkonomi*(online),(repository.unyk.ac.id/2429/1/sulsodikApril2010.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
- Suryana.2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutarno, & Kuncoro, Mudrajad. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (online), (journal.uui.ac.id › Home › Vol 8, No 2 (2003) › Sutarno) diakses pada tanggal 12 Januari 2013.
- Sutrisno, Adi. 2012. Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal* (online), (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>) diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: TeoridanAplikasi*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Todaro, S.M.P, dan Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Terjemahan Haris Munandar, dan Puji A.L. 2006 . Jakarta: Erlangga.
- Umiyati, Etik. 2012. Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika* (online), (<http://online-journal.unja.ac.id> › Home › Vol 1, No 5 (2012) › Yati) diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
- Utama, Fajar. 2011. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008. *Jurna lEkonomi Pembangunan* (online), (<eprints.undip.ac.id/26414/2/JURNAL.pdf>) diakses pada tanggal 25 Januari 2013.